



Hibah Daerah Penyangga Dinilai Sia-sia

DKI Kucurkan Bantuan Hibah Rp 358 Miliar

SEJUMLAH kalangan menyoroti pemberian bantuan keuangan kepada daerah mitra berupa hibah, di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang mencapai ratusan miliar. Terlebih, pada masa-masa sebelumnya bantuan itu tidak memiliki dampak menguntungkan apa-apa bagi warga Jakarta.

"Buat apa menghamburkan uang rakyat

Anggaran Bantuan Daerah Penyangga	
1. Kabupaten Bogor	: Rp 67,4 miliar
2. Kota Tangerang	: Rp 100 miliar
3. Kota Bekasi	: Rp 98,1 miliar
4. Kota Tangerang Selatan	: Rp 74,8 miliar
5. Kabupaten Tangerang	: Rp 17,7 miliar
Total bantuan	: Rp 358 miliar

Jakarta untuk daerah lain, kalau tidak ada timbal baliknya," ujar Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru, kemarin (3/5).

Dia juga mengatakan, pemberian bantuan berupa hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, bertujuan agar daerah tetangga bisa membantu pemprov dalam masalah banjir dan kemacetan.

Pemerintah daerah tetangga juga, diharapkan ikut mengendalikan banjir, dengan menertibkan bangunan liar di daerah resapan air, membangun waduk-waduk dan menanam pohon penyerap air agar ancaman banjir bisa dikurangi.

"Namun semua tidak dilakukan oleh pemda wilayah penyangga. Salah satu buktinya di kawasan Puncak, Bogor vila-vila terus dibangun dengan mengabaikan daerah resapan air. Akibatnya banjir masih terus terjadi karena air kiriman dari wilayah itu," jelasnya juga.

Kritikan serupa pernah dilontarkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek ■

Menurutnya, anggaran hibah dari Pemprov DKI ke daerah penyangga menjadi salah satu poin yang disorot oleh pihaknya.

Reydonnyzar berpendapat, semisal untuk penanganan banjir, daerah mitra seperti Bogor harusnya dapat mengupayakan pembangunan sumber daya air guna mencegah banjir.

Karena banjir disebabkan rendahnya konservasi sumber daya air di kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur). "DKI harusnya mendorong itu. Dengan memberi bantuan kepada Bogor sepanjang bisa menjaga keberlangsungan sumber daya air di Bopunjur. Dengan cara itu banjir bisa dikendalikan," ungkapnya.

Sedangkan Pemprov DKI, kata Donny juga, seakan hanya fokus pada pembangunan fisik di daerah mitra untuk 'menyebarkan' beban Ibu Kota saja. Namun masalah banjir yang sudah melekat dengan Jakarta seakan tidak dipedulikan.

"Jangan bangun fisik saja dong. Inikan seakan bangun fisik terus yang dikejar. Sepanjang di daerah atas (seperti Bogor, Puncak dan Cianjur) harusnya juga ditanami tumbuhan

hijau penyerap air. Tapi yang kita temukan justru pembangunan fisik," ucap dia.

Kemendagri pun meminta dana hibah untuk daerah penyangga DKI lebih mendahulukan proyek aliran air, ketimbang mengejar pembangunan infrastruktur.

Untuk diketahui, kucuran dana hibah untuk daerah penyangga DKI pada APBD DKI 2015 mencapai Rp 358 miliar untuk 5 wilayah penyangga. Yakni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Pemkot Bekasi, Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Tangerang, Pemkab Bekasi dan Kabupaten Cianjur (selengkapnya lihat grafis).

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah memangkas nilai bantuan keuangan kepada daerah mitra di dalam APBD DKI 2015. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono menjelaskan kota mitra tidak akan mendapat nilai bantuan seperti yang diusulkan dalam proposal. Pasalnya, pagu APBD DKI 2015 pun telah ditetapkan Rp 69,286 triliun dari Rp 72,9 triliun.

"Jumlahnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah mitra dalam menangani banjir, macet, dan kebutuhan transportasi," terangnya. Adapun nilai total usulan bantuan keuangan untuk daerah mitra, jumlahnya mencapai Rp 3,4 triliun. Sementara itu, Pemprov DKI hanya memberi rekomendasi (bantuan keuangan) totalnya Rp 399,3 miliar tapi kembali dikurangi menjadi Rp 358 miliar.

Rinciannya, Kabupaten Bogor yang sebelumnya mengusulkan Rp 100,4 miliar hanya mendapat bantuan keuangan Rp 67,4 miliar. Kemudian Kota Bogor yang mengusulkan bantuan Rp 121 miliar, hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 13 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang yang mengusulkan Rp 67 miliar, hanya mendapat bantuan keuangan Rp 17,7 miliar.

Lalu Kota Tangerang mengusulkan bantuan keuangan Rp 2,4 triliun hanya mendapat rekomendasi bantuan Rp 100 miliar, Kota Tangerang Selatan yang mengusulkan bantuan keuangan Rp 164,8 miliar hanya diberikan Rp 74,8 miliar. Kemudian Kota Bekasi yang mengusulkan bantuan keuangan Rp 200 miliar, hanya mendapat bantuan Rp 98,1 miliar.

Sedangkan permintaan bantuan dari Kabupaten Bekasi mencapai Rp 100 miliar dan



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kabupaten Cianjur yang mengusulkan bantuan keuangan Rp 26,4 miliar untuk daerahnya. "Nilai rekomendasi inilah nilai yang akan kami berikan kepada daerah mitra," kata Heru juga.

Bantuan keuangan kepada daerah mitra ini, lanjut Heru, dapat dicairkan sebelum bulan Juni nanti. Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga telah membentuk tim pemantau pengawasan penyaluran bantuan keuangan kepada daerah mitra tersebut.

Pemerintah daerah mitra juga diimbau disiplin memberi laporan pertanggungjawaban. Apabila penggunaan bantuan keuangan tidak terserap atau digunakan, kata Heru juga, daerah mitra bisa mengembalikannya dengan catatan pengembalian dan dimasukkan kembali dalam anggaran tahun depan. (wok)